**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

21/10/05
Catatan: Harga Dasar Bangunan per meter persegi yg berlaku pd...
berjalan/RAB
Bangunan
Taris...
Perda

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Retribusi Daerah guna memacu penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2001 untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang bangunan;
5. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan atau organisasi lainnya yang sejenis;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Perusahaan industri adalah badan hukum / Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang Industri;
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Industri;

9. Bangunan

9. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang dibangun diatas pondasi yang seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah atau didalam tanah dan/atau air baik permanen maupun semi permanen;
10. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki /mengganti seluruh atau sebagian bangunan;
11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
12. Garis Sepadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ adalah garis yang ditetapkan dalam rencana kota berdasarkan Peraturan Daerah;
13. Pembangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau pengairan;
14. Bangunan Barak Kerja/Base Camp adalah bangunan yang perbentukannya sementara dan umur bangunan lebih dari 100 (seratus) hari dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dipergunakan/diperuntukan melakukan pemadaman/mematikan api;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang lainnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan Izin Mendirikan Bangunan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan Baru baik konstruksi kayu/papan, tembok maupun Konstruksi Baja;
- b. Izin Bangunan Baru untuk bangunan teras tertutup dan teras terbuka;
- c. Izin Renovasi Bangunan dan Perbaikan Bangunan baik perbaikan ringan maupun berat;
- d. Izin Perluasan Bangunan;
- e. Izin Mendirikan Pagar Tembok, pagar besi dan pagar ram kawat;
- f. Izin Revisi Bentuk dan Ukuran Bangunan;
- g. Izin Mendirikan Bangunan Jembatan maupun memperbaharui jembatan / jembatan darurat;
- h. Izin Membuat Jalan Tanah, Jalan Koral dan Jalan Aspal / Beton maupun perbaikan jalan;
- i. Izin Bangunan Menara atau tower;
- j. Izin Membuat Kolam Tanah, tembok, bak dan water treatment / tanki air;
- k. Izin Membuat Kolam Renang;
- l. Izin Membuat Lapangan Olah Raga terbuka maupun tertutup;
- m. Izin Membuat Lantai Terbuka, rabat dan tempat jemuran yang menggunakan Kontruksi Beton luas tidak lebih 1.000,- (Seribu) M²;
- n. Izin Pembangunan Sarana Irigasi;
- o. Izin Pembuatan Pagar Sementara/Pagar Pengaman;
- p. Izin Mendirikan Barak Kerja/ Base Camp atau sejenisnya;
- q. Izin Pembuatan Siring pasangan dan gorong-gorong;
- r. Izin Membangun Pabrik.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.